



**BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA
PROVINSI GORONTALO**

Sertifikat

Nomor : 04/PANPEL/BKOWFAIR

Diberikan Kepada

Nama : Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag., MH

SEBAGAI **PEMATERI** PADA SEMINAR BKOW PROVINSI GORONTALO
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KARTINI

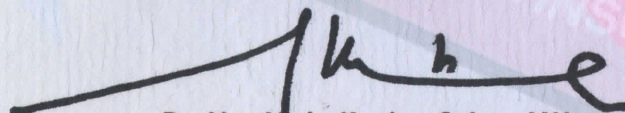
Bertempat Di Gedung Hotel DAMHIL UNG , Pada Tanggal 28 April 2016

NARASUMBER :

Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum Materi : Perlindungan Hak Politik Perempuan


Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag., MH Materi : Perempuan dan Politik

KETUA PANITITA


Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag., MH

KETUA BKOW PROVINSI GORONTALO




Dr. Hj. Nurinda Rahim, Msc

52.



**BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA (BKOW)
PROVINSI GORONTALO**

Sekretariat: Jl.M.Thamrin Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo
Telp. / Fax : (0435) – 828560, e-mail : bkow_gorontalo@yahoo.co.id

Nomor : 11/Pan-Pel/BKOW.Gtlo/IV/2016

Gorontalo, 25 April 2016

Lamp : -

Hal : **Permintaan Kesediaan / Pemateri**

Kepada yth.

Dr.Nur M.Kasim,S.Ag,MH

Di -

Gorontalo

Dengan Hormat

Dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2016, kami dari BKOW Provinsi Gorontalo akan melaksanakan Seminar BKOW Dengan **TEMA : Perlindungan Perempuan Dalam Kehidupan Bernegara**, yang menghadirkan pemateri Nasional dan Daerah. Untuk maksud itu melalui kesempatan ini kami memintakan kesediaan kiranya Ibu berkenan untuk menjadi pemateri di dalam kegiatan di maksud dengan judul Perempuan dan Politik .

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas kerjasama Ibu disampaikan terima kasih.



Ketua
BKOW Provinsi Gorontalo

[Handwritten Signature]
Ny.dr.Hj.Nurinda Rahim,M.Sc

PEREMPUAN DAN POLITIK*

Oleh : DR. NUR KASIM, S.Ag.,MH

KATA PENGANTAR

Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif setelah hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis (Lihat tabel 1 & 2). Kesempatan ini jelas adalah peluang emas, setelah sekian lama perempuan ada dalam bayang-bayang superioritas politik dikotomi perempuan *versus* laki-laki.

Laki-laki dalam kurun waktu yang cukup lama dipandang sebagai subyek yang mengatur atau yang paling berhak dalam ranah publik. Laki-laki kemudian hampir keseluruhan bidang menguasai peran-peran penting, sementara pada saat yang sama perempuan terus diperankan sebagai pelayan yang membantu kerja laki-laki. Adagium peran domestik perempuan hanya berurusan dengan "kasur dan dapur" jelas adalah pemasangan paradigma yang mengkhianati hak-hak azasi manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang diciptakan dengan potensi yang sama. Perempuan jelas memiliki kemampuan yang sama karena itu semangat penghapusan dikotomi gender dalam pemerintahan KH. Abdurahman Wahid melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 adalah sebuah *good will* politik yang menghapus perbedaan gender dalam pembangunan nasional adalah langkah maju yang positif.

Hal ini merupakan bagian dari pengakuan bahwa tidak sedikit perempuan yang mengukir prestasi dan memberi sumbangsih pada harumnya nama bangsa dan Negara atas kreasi kaum perempuan dalam bidang-bidang tertentu. Berbagai bidang yang digeluti oleh laki-laki dapat dilakukan oleh kaum perempuan seperti olahraga keras; tinju, karate, gulat dan angkat besi. Sementara dalam kepemimpinan dan ketokohan juga ada nama-nama besar perempuan yang pernah menjadi Presiden, Menteri, Bankir dan sebagainya. Di Indonesia ada nama pejuang kemerdekaan yaitu Tjut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu dan juga pernah ada presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Puteri sebagai perempuan pertama yang meruntuhkan mitos dan teologi yang sekian lama dipakai oleh lawan politik untuk menggajjal kaum perempuan memimpin negara ini.

Sejarah panjang kiprah dan peran perempuan di Indonesia yang prestisius harus pula mampu untuk tampil mengambil peran dalam era globalisasi yang menuntut kesiapan *skill* yang tinggi dan relatif berat karena globalisasi ternyata bermata dua dan sangat membahayakan jika tidak dibarengi dengan strategi politik yang kuat. Globalisasi menawarkan beragam kemudahan hidup dengan instrumen-instrumen kecanggihan serta budaya secara instan sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia, bila tidak ada desain dan format kebangsaan yang baik, maka semakin mudah bangsa ini menjadi "bulan-bulanan".

PERAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

Seiring dengan beragam persoalan yang dialami perempuan yang hak-haknya sering dirampas dan belum di letakan sebagaimana mestinya oleh kebanyakan masyarakat, dimana masih tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan yang dilakukan oleh oknum maupun institusi jelas merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius secara politik.

Politik memang bukan satu-satunya solusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan masalah-masalah kaum hawa yang mengalami kekerasan fisik berupa penganiayaan dan teror. Tapi juga secara mental atau psikologis yang mengharuskan masalah itu dapat disembuhkan serta memulihkan rasa percaya diri secara normal sebagai seorang manusia. Mereka yang mengalami masalah akan mudah ditolong tatkala politik sebagai salah satu *power* dipegang individu yang punya komitmen politik yang kuat pada masalah perempuan.

Masalah politik inilah yang harus dipegang oleh orang-orang yang seyogyanya adalah perempuan itu sendiri. Bagaimanapun urusan-urusan perempuan secara psikologis dan kultur yang bersifat inheren atau menginternal lebih diketahui oleh perempuan sendiri. Karena itu perjuangan ini akan efektif bila sarana politik yang sudah tersedia dalam jatah 30 % harus direbut oleh perempuan bila masalah-masalah perempuan yang seabrek ingin diminimalisir melalui kekuatan politik di parlemen mendatang.

PEREMPUAN, KULTUR DAN MASALAHNYA

Hasil pemilu Th 2004 baru mampu mengakomodasi kursi perempuan sebanyak 10, 7 % atau hanya 28 orang dari 550 anggota parlemen yang menjadi wakil rakyat untuk periode

2004-2009.. Angka ini jelas belum bisa mewakili *power* perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa sehingga mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara keseluruhan. Partai politik belum sepenuhnya *athome* dengan kewajiban 30 % mencalonkan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) nomor jadi. Yang ada perempuan justru dipasang sebagai simbol akomodatif, dengan nomor-nomor sepatu yang susah meloloskan perempuan menuju kursi parlemen.

Model yang dipakai partai pada perempuan hanya simbolik atau *lips service* sebagai strategi dari partai yang ujung-ujungnya menarik konstituen memilih partai yang ada *ansich*. Tidak tahu apa alasan perempuan di partai cuma dipajang, kesan bahwa perempuan tidak memiliki syarat standar dan cenderung lemah dan terbatas adalah argumentasi yang bersifat apologi atau mencari-cari kelemahan perempuan saja. Sikap ambivalensi partai yang cenderung mendua dalam melihat perempuan adalah gambaran dari sikap masyarakat kita yang belum sepenuhnya melihat perempuan sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat.

Paradigma lama bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan terbatas serta hanya berfungsi sebagai pelengkap kaum adam, masih cukup dominan menghinggapi cara berpikir mayoritas masyarakat kita. Di Era Globalisasi ini, seharusnya kaum perempuan bukan lagi diposisikan sebagai warga negara kelas dua, dibawah bayang-bayang kekuasaan kaum laki-laki, tetapi harus diposisikan dan dijadikan sebagai mitra yang mempunyai harkat, martabat serta derajat yang sama.

Politik yang santun dan dewasa dalam masyarakat kita memang masih sulit diperankan oleh siapapun. Dewasa ini justru yang menonjol adalah politik yang menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingan dan target yang sifatnya oportunistik dan finansial semata. Itu sebabnya politisasi atas nama agama, tradisi dan etnisitas yang mengemuka dan sering menjadi biang konflik horizontal tak lebih dari kreasi yang namanya politik atas nama kepentingan serta tujuan tertentu dalam melanggengkan *status quo* itu sendiri.

Politik yang penuh persaingan inilah yang harus dihadapi bila perempuan mau terjun memilih politik sebagai pilihan pengabdian dalam membantu merubah wajah politik Indonesia yang coreng moreng khususnya orang-orang yang ingin menjadi katalisator-katalisator perubahan bagi perempuan lain yang masih banyak tertinggal serta banyak pula sebagai korban-korban kekerasan yang belum tersentuh oleh kebijakan Negara sampai sekarang ini.

Beberapa jenis hambatan yang masih dialami oleh sebagian besar perempuan di Indonesia:

1. Hambatan Kultural

Mayoritas masyarakat kita, masih didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara *cultural* dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendi kehidupan.

Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

2. Hambatan Sosial

Struktur sosial masyarakat kita yang cenderung menempatkan perempuan sebagai "warga negara no 2 di bawah kaum laki-laki", telah memberi dampak tersendiri bagi keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk dalam konteks hubungan suami-istri di lingkungan rumah tangga.

Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap "menerima" tanpa perlawanan (*reserve*) sehingga pada akhirnya kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek dari pada sebagai subjek yang menjadi mitra kaum laki-laki. Kekerasan rumah tangga yang sering menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, adalah sebuah contoh nyata dimana kaum perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan

ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari kaum laki-laki. Lahirnya UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) membuktikan bahwa sering sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan karena cara pandang kaum pria terhadap perempuan. Begitu pula dalam kasus hubungan suami-istri, kaum perempuan cenderung diperlakukan tidak sejajar dan dalam posisi *bargaining* yang lemah sehingga dominasi dan ego kaum laki-laki seolah-olah mendapatkan tempat yang lebih baik. Padahal dalam konteks, penularan HIV/AIDS misalnya, kaum perempuan mempunyai resiko 2,5 kali lebih besar dari kaum laki-laki.

3. Hambatan Ekonomi

Dalam masalah karir, wanita juga masih mengalami diskriminasi diberbagai hal sehingga kaum perempuan tidak jarang diberlakukan kurang adil dan tidak proporsional. Dalam kasus PHK misalnya, kaum perempuan akan menjadi pihak yang mempunyai resiko lebih besar di bandingkan kaum laki-laki. Begitu pula dalam penetapan standar gaji, tidak jarang kaum perempuan tidak mendapatkan haknya secara proporsional.

4. Hambatan Politik

Hambatan politik merupakan salah satu hambatan yang cukup besar yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia. Hal ini tidak hanya tercermin dalam produk perundang-undangan maupun peraturan yang cenderung bersifat "maskulin", dimana segala sesuatu pokok masalah lebih dilihat dari kacamata kepentingan kaum laki-laki, tetapi menyangkut pula masih terbatasnya ruang yang tersedia bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam posisi jabatan-jabatan publik. Walaupun akhir-akhir ini sudah mulai terlihat adanya keberpihakan dan pengakuan akan perlunya peranan kaum perempuan dalam politik, namun kebijakan-kebijakan tersebut masih diberlakukan "setengah hati" dan belum maksimal. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila jumlah perempuan yang terjun dalam dunia politik yang selalu di identikan dengan dunia laki-laki ini, masih sangat terbatas. Begitu pula jumlah perempuan yang dapat mencapai posisi puncak dalam jenjang birokrasi di pemerintahan, masih jauh dari harapan apabila melihat komposisi jenis kelamin warga negara Indonesia tidak kurang dari 51%nya adalah kaum perempuan.

PELUANG KAUM PEREMPUAN DALAM POLITIK

Peran kaum perempuan di Indonesia khususnya di bidang politik, memperlihatkan pasang surut yang cukup dinamis dari masa ke masa. Pada dasarnya sudah ada semenjak sebelum kemerdekaan dikumandangkan, dimana pada saat pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terdiri dari 68 orang - dua diantaranya adalah perempuan, yaitu Ny. Maria Ulfah Santoso dan Ny. RSS Soenarjo Mangoenpoespito. Begitu juga dalam konteks jabatan publik, pada tahun 1946 di masa pemerintahan kabinet Syahrir, untuk pertama kalinya dalam sejarah jabatan publik, seorang Maria Ulfa Santoso diangkat menjadi Menteri Sosial. Begitu juga pada masa pemerintahan kabinet Amir Syarifudin (3 Juli 1947 - 29 Januari 1948), Ny. Sk Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan.

Pada Era reformasi sekarang ini, peran, fungsi dan kedudukan perempuan, mendapatkan peluang yang besar besar untuk dapat berkarya di dalam segala aspek kehidupan. Walaupun hambatan-hambatan struktural maupun non struktural, masih sering kita jumpai - tetapi pada hakekatnya kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal semakin terbuka lebar. Berbagai bentuk Perundang-undangan (seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga) mulai diakomodir oleh pemerintah sebagai sebuah bentuk perlindungan kepada kaum perempuan. Oleh sebab itu kaum perempuan di Indonesia harus pandai-pandai melihat peluang dan memanfatkannya secara maksimal untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sendiri.

Tabel 1
PROSENTASE PEREMPUAN DI DPR DARI MASA KE MASA

Jenis Kelamin	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante : 1956-1959	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,8	460	92,2
1977-1982	29	6,3	460	93,7
1982-1987	39	8,5	460	91,5
1987-1992	65	13,0	500	87,0
1992-1997	65	12,5	500	87,5

1997-1999	54	10,8	500	89,2
1999-2004	45	9,0	500	91,0
2004-2009	11	10,7	550	89,3

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2
JUMLAH PEREMPUAN YANG DUDUK DI LEGISLATIF
HASIL PEMILU 2004

DPR	DPD	DPRD Tingkat I
10,7	21 %	9 %
550	128	1.849

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Data peran perempuan dari masa ke masa menunjukkan bahwa tidak mustahil angka optimisme 51% bisa tercapai sekaligus dapat membangun harapan baru masa depan masyarakat Indonesia bila mayoritas parlemen dipegang oleh kaum perempuan.

Dua Negara, Peru dan Swedia telah menjadi contoh bahwa pemerintah korup dan semrawut dapat teratasi secara baik dan mampu menurunkan tingkat korupsi serta memberi harapan kesejahteraan lebih baik dengan tampilnya perempuan dalam politik praktis dapat memacu perempuan Indonesia untuk terus ambil bagian dalam perbaikan hidup masyarakat Indonesia melalui dunia politik. Contoh Negara Peru dan Swedia adalah contoh suksesnya perempuan mengambil peran ketika Negaranya sedang dalam masalah yang pelik akibat korupsi yang mengkhawatirkan tersebut. Disinilah sesungguhnya urgensi perempuan Indonesia memanfaatkan peluang keterbukaan dan globalisasi dalam emansipasinya yang lebih besar yaitu demi sebuah perbaikan bangsa dan negara tercinta.

Alasan perempuan Indonesia mampu dan dapat menjadi kekuatan perubahan bukan sesuatu yang mustahil. Dari data dan sejarah perempuan dalam lembaga-lembaga penting (lihat tabel 3) menunjukkan signifikansi peran perempuan baik pada era reformasi maupun masa-masa sebelumnya yaitu orde baru, orde lama maupun masa-masa kemerdekaan, perempuan Indonesia sudah terlibat dalam perjalanan bangsa sejak revolusi fisik sampai sekarang adalah modal sejarah yang bisa dipakai perempuan Indonesia dalam era reformasi yang sudah mengakui peran perempuan melalui legitimasi undang - undang partai maupun dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Tabel 3
PEREMPUAN DALAM LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK FORMAL
DI INDONESIA PADA TAHUN 2002

LEMBAGA	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	
	<i>Jumlah</i>	<i>Prosentase</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Prosentase</i>
MPR	18	9,2	117	90,8
DPR	44	8,8	445	91,2
MA	7	14,8	40	85,2
BPK	0	0	7	100
DPA	2	4,4	43	95,6
KPU	2	4,4	9	81,9
Gubernur	0	0	30	100
Walikota/Bupati	5	1,5	331	38,5
Eselon IV dan III	1.883	7,0	25.110	93,0
Hakim	536	16,2	2.775	83,8
PTUN	35	23,4	150	76,6

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

UU Pemilu No 12 Tahun 2003 tentang partai politik pasal 65 ayat (1) yang menganjurkan partai politik untuk mencalonkan perempuan sebanyak 30 % untuk duduk di DPR - DPD, DPR I dan DPRD II serta Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 yang berisikan penghapusan gender dalam pembangunan nasional, merupakan sebuah legitimasi politik Negara yang harus dimanfaatkan sebagai momentum politik bagi perempuan dalam mengartikulasikan kemampuannya sebagai makhluk Tuhan yang di ciptakan dengan potensi yang sama tinggi dan sama derajat dengan kaum laki - laki untuk turut memecahkan persoalan bangsa dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

- n Peran kaum perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah ada semenjak lama, termasuk dalam masa-masa kolonialisme maupun kemerdekaan
- n Globalisasi telah memberi peluang yang lebih baik terhadap kaum perempuan untuk berperan secara wajar dan sejajar dengan kaum pria, baik dalam konteks isu hak asasi manusia, demokratisasi maupun kesamaan gender
- n Saat ini banyak perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong kaum perempuan agar dapat berkiprah secara lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam konteks kehidupan politik
- n Peran kaum perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam konteks politik, seharusnya tetap memperhatikan peran dan fungsi perempuan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri.

PENUTUP

Politik yang dikatakan orang kejam dan kotor tak boleh menghambat kaum perempuan untuk ragu masuk dan terlibat di dalamnya, bahkan inilah waktunya bagi perempuan untuk masuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak melalui kekuatan nurani perempuan yang akan menjadi kekuatan penyeimbang dari tatanan lama yang amburadul akibat birokrasi yang korup maupun mauapun tata kelola pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai demokratis. Keterlibatan perempuan yang dominan dalam politik di Negara Swedia dan Peru menjadi bukti bahwa politik yang sehat dan mampu menciptakan kesejahteraan dan menghilangkan korupsi dapat diperankan oleh politisi perempuan.

Kehadiran politisi-politisi perempuan dalam kondisi masyarakat sekarang sangat dibutuhkan karena masalah perempuan yang rawan kekerasan baik oleh oknum individu maupun institusi, dapat diminimalisir oleh keterlibatan perempuan sendiri bila *power* politik bisa di genggam sendiri oleh perempuan. Kultur taat yang memasung perempuan melalui adat istiadat dan tradisi dapat dihilangkan melalui advokasi dan sosialisasi politik.